

EVALUASI PASCA PELAKSANAAN DAN INKLUSIVITAS AKTOR DALAM PEMERINTAHAN DESA ULAWENG CINNONG

Happy Helmalia Kartika Armys

Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

Email: happyhthalmia@gmail.com

Abstract

This study evaluates post-implementation policy performance and actor inclusiveness in the governance of Ulaweng Cinnong Village, Bone Regency, following the 2017-2022 Village Medium-Term Development Plan. It applies a convergent mixed-method design with a qualitative emphasis. Interviews, observation, and document review were integrated at the interpretation stage with questionnaire data from 50 respondents drawn from village government, the Village Consultative Body, development cadres, and community organizations. The analysis covers ex-ante and ongoing evaluation as a baseline, post-implementation evaluation, and actor inclusiveness across three policy directions. Recalculation of the respondent table produced a mean score of 73.52 for ex-ante/ongoing evaluation and 75.94 for the composite post-implementation/inclusiveness index; both are categorized as effective. The findings indicate improvements in recruitment procedures, administrative capacity, budget transparency, and participatory forums. However, unequal access to information, incomplete interinstitutional collaboration, and the composite measurement of post-implementation evaluation and inclusiveness limit the strength of the conclusions. Future planning should separate the two constructs and connect citizen proposals to documented decisions, budgets, and follow-up actions.

Keywords: Post-Implementation Evaluation, Actor Inclusiveness, Village Governance, Public Participation, Bone Regency.

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi kinerja kebijakan pascapelaksanaan dan inklusivitas aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Ulaweng Cinnong, Kabupaten Bone, setelah berakhirnya RPJMDes 2017-2022. Penelitian menggunakan desain metode campuran konvergen dengan penekanan kualitatif. Wawancara, observasi, dan telaah dokumen diintegrasikan pada tahap interpretasi dengan data angket dari 50 responden yang berasal dari pemerintah desa, BPD, kader pembangunan, dan kelembagaan masyarakat. Analisis mencakup evaluasi ex-ante dan on-going sebagai kondisi pembanding, evaluasi pascapelaksanaan, serta inklusivitas aktor pada tiga arah kebijakan. Perhitungan ulang tabel responden menghasilkan rata-rata 73,52 untuk evaluasi ex-ante/on-going dan 75,94 untuk indeks gabungan evaluasi pascapelaksanaan/inklusiivitas; keduanya berada pada kategori efektif. Temuan menunjukkan perbaikan prosedur rekrutmen, kapasitas administrasi, transparansi anggaran, dan forum partisipatif. Namun, akses informasi belum merata, kolaborasi antarlembaga belum tuntas, dan penggabungan evaluasi pascapelaksanaan dengan inklusivitas membatasi ketajaman kesimpulan. Perencanaan berikutnya perlu memisahkan kedua konstruk tersebut dan menghubungkan usulan warga dengan keputusan, anggaran, serta tindak lanjut yang terdokumentasi.

Kata kunci: Evaluasi Pascapelaksanaan, Inklusivitas Aktor, Pemerintahan Desa, Partisipasi Publik, Kabupaten Bone

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui desa sebagai satuan pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa lokal. Dalam kerangka tersebut, kebijakan publik di tingkat desa menjadi instrumen untuk mengarahkan sumber daya, pelayanan, dan pembangunan. Pelaksanaan kebijakan memerlukan tujuan yang jelas, sumber daya memadai, karakter pelaksana yang mendukung, serta komunikasi antarlembaga yang konsisten (Kurahyadi, 2023). Pelaksanaan juga perlu dipahami sebagai rangkaian keputusan operasional yang menghubungkan perumusan dengan tindakan di tingkat pelaksana (Desrinelti et al., 2021). Penggunaan bukti ditentukan oleh interaksi aktor, konteks organisasi, dan mekanisme pembelajaran kebijakan (Bullock et al., 2021).

Desentralisasi desa membuka ruang partisipasi, tetapi kualitas tata kelola tidak otomatis seragam. Variasi hubungan antara kepala desa, perangkat, Badan Permusyawaratan Desa, organisasi masyarakat, dan warga membentuk rezim tata kelola yang berbeda antardesa (Aspinall et al., 2025). Bahkan, forum deliberatif dapat berlangsung tanpa akuntabilitas yang kuat ketika warga tidak memiliki informasi, daya tawar, atau mekanisme tindak lanjut yang memadai (Haryanto et al., 2025). Karena itu, inklusivitas perlu dibaca tidak hanya dari kehadiran masyarakat, tetapi juga dari akses terhadap informasi, kesempatan menyampaikan kepentingan, dan pengaruh nyata terhadap keputusan.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa berhubungan dengan kepercayaan masyarakat (Sofyani et al., 2022). Kinerja pelayanan desa juga meningkat ketika prinsip tata kelola yang baik disertai partisipasi warga (Handayani et al., 2023). Tata kelola desa yang inklusif membutuhkan pengakuan terhadap kepentingan yang beragam, kapasitas

aparatur, dan institusi partisipatif yang dapat menjembatani keputusan desa dengan kebutuhan warga (Annahar et al., 2023). Meski demikian, studi-studi tersebut belum menjelaskan secara bersamaan bagaimana hasil kebijakan setelah satu siklus RPJMDes berhubungan dengan tingkat keterlibatan aktor pada desa yang sama. Kekosongan ini menjadi dasar untuk menghubungkan evaluasi pascapelaksanaan dengan kualitas inklusivitas aktor.

Evaluasi *ex-post* dilaksanakan setelah program atau kebijakan berjalan untuk menilai hasil, dampak, relevansi, serta pelajaran bagi perbaikan berikutnya. Kualitas desain evaluasi, independensi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kejelasan mekanisme tindak lanjut memengaruhi penggunaan hasil evaluasi (Knap et al., 2023). Evaluasi perlu dihubungkan dengan proses perumusan dan implementasi agar tidak berhenti sebagai penilaian administratif, melainkan menjadi umpan balik bagi keputusan publik berikutnya (Nabatchi et al., 2017).

Desa Ulaweng Cinnong, Kabupaten Bone, telah menyelesaikan RPJMDes 2017-2022. Berdasarkan RPJMDes dan dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditelaah, tiga arah kebijakan yang dievaluasi ialah penyesuaian organisasi pemerintah desa dan pengangkatan perangkat; peningkatan pelayanan administrasi; serta penetapan prioritas dan penyusunan dokumen pembangunan. Catatan awal dalam dokumen tersebut menunjukkan perencanaan yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, keterampilan perangkat yang terbatas, serta hubungan kerja dan komunikasi antarpelaku yang belum optimal. Penelitian ini menilai capaian ketiga arah kebijakan dan menguji sejauh mana aktor pemerintahan serta masyarakat memperoleh akses, ruang menyampaikan kepentingan, dan pengaruh dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain metode campuran konvergen dengan penekanan kualitatif. Data kualitatif dari observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data kuantitatif dari angket dianalisis menurut prosedurnya masing-masing, kemudian dipertemukan pada tahap interpretasi. Integrasi dilakukan dengan membandingkan apakah pola skor responden didukung, diperinci, atau justru dipertentangkan oleh temuan wawancara dan dokumen. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan praktik kelembagaan dan pengalaman aktor secara kontekstual (Fadli, 2021).

Populasi penelitian berjumlah 100 orang yang mencakup pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, kader pembangunan, serta kelembagaan masyarakat. Ukuran sampel angket sebanyak 50 responden dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10 persen. Responden dipilih dari kelompok aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; pembagian jumlah responden perkelompok tidak terdokumentasi dalam data penelitian dan diperlakukan sebagai keterbatasan. Angket menggunakan skala lima poin. Skor dikonversi menjadi indeks 0-100 dan ditafsirkan dengan interval 80-100 sangat efektif, 60-79 efektif, 40-59 kurang efektif, 20-39 tidak efektif, dan 0-19 sangat tidak efektif. Interpretasi kategori digunakan sebagai deskripsi persepsi, bukan ukuran dampak kausal.

Kisi-kisi instrumen menghubungkan tiga arah kebijakan RPJMDes dengan indikator ex-ante, on-going, ex-post, dan inklusivitas aktor. Analisis kuantitatif menggunakan jumlah skor, rata-rata, rentang, simpangan baku, dan distribusi kategori. Data kualitatif dianalisis melalui pengodean, pengelompokan tema, penyajian, penarikan kesimpulan, dan verifikasi berulang (Rijali, 2018). Keabsahan temuan diperiksa melalui triangulasi sumber

dan teknik serta jejak analitis yang menghubungkan data dengan tema (Nowell et al., 2017). Kecukupan data wawancara mempertimbangkan tujuan, heterogenitas partisipan, dan kedalaman informasi (Guest et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan pada penelitian ini membedakan tiga waktu penilaian. Evaluasi ex-ante menilai kesiapan tujuan, sumber daya, dan risiko sebelum kebijakan dijalankan. Evaluasi on-going memantau pelaksanaan dan membuka ruang koreksi selama program berlangsung. Evaluasi ex-post membandingkan rencana dengan hasil setelah periode kebijakan selesai. Kerangka ini menempatkan evaluasi sebagai proses pembelajaran kebijakan. Penilaian ex-post yang berguna memerlukan bukti yang relevan dan jalur tindak lanjut yang jelas (Knap et al., 2023).

Partisipasi juga dipahami sebagai spektrum yang mencakup pemberian informasi, konsultasi, deliberasi, dan kolaborasi. Ragam partisipasi memiliki tujuan dan konsekuensi yang berbeda bagi legitimasi keputusan publik (Nabatchi et al., 2017). Karena itu, keberadaan forum musyawarah belum cukup; kualitas inklusivitas ditentukan oleh keterwakilan, akses informasi, kemampuan menyampaikan pendapat, dan respons pemerintah desa. Struktur kolaboratif perlu dirancang agar pembagian tanggung jawab, aturan interaksi, dan mekanisme akuntabilitas dapat dipahami oleh semua pihak (Douglas et al., 2020).

Tabel 1. Skor Angket Responden yang Dianonimkan

Kode	Ex-ante/On-going	Ex-post/Inklusivitas*
R01	77	80
R02	60	58

Kode	Ex- ante/On- going	Ex- post/Inkl usivitas*
R03	88	85
R04	50	61
R05	82	80
R06	84	82
R07	84	74
R08	85	86
R09	81	82
R10	78	80
R11	49	76
R12	53	37
R13	88	83
R14	85	81
R15	61	73
R16	86	85
R17	83	82
R18	53	76
R19	73	80
R20	70	77
R21	78	84
R22	85	80
R23	80	82
R24	84	79
R25	51	75
R26	84	81
R27	63	65
R28	78	77
R29	41	53
R30	58	63
R31	56	70
R32	87	81
R33	85	84
R34	78	75
R35	80	83
R36	59	67
R37	81	79
R38	80	79
R39	59	70
R40	50	69
R41	77	100
R42	66	60
R43	75	71
R44	72	73
R45	78	83
R46	87	65
R47	77	80
R48	82	76

Kode	Ex- ante/On- going	Ex- post/Inkl usivitas*
R49	85	86
R50	90	89

Evaluasi Ex-ante dan On-going

Perhitungan ulang terhadap 50 baris data responden menghasilkan jumlah skor ex-ante/on-going sebesar 3.676 dengan rata-rata 73,52, rentang 41-90, dan simpangan baku 13,19. Sebanyak 23 responden berada pada kategori sangat efektif, 16 efektif, dan 11 kurang efektif. Tidak ada responden pada kategori tidak efektif atau sangat tidak efektif. Sebaran ini menunjukkan penilaian umum yang positif, tetapi variasi antarpengalaman responden tetap nyata dan tidak boleh ditutupi oleh nilai rata-rata.

Pemerintah desa telah menyampaikan rencana program kepada unsur masyarakat dan menggunakan musyawarah sebagai saluran komunikasi. Praktik ini penting karena kepercayaan publik tumbuh ketika informasi tersedia dan pemerintah dapat mempertanggungjawabkan keputusan (Sofyani et al., 2022). Namun, rentang skor yang lebar menunjukkan bahwa akses informasi dan pengalaman pelayanan belum merata. Evaluasi berjalan perlu dilengkapi dokumentasi tindak lanjut, indikator kinerja pelayanan, dan mekanisme pengaduan yang dapat dilacak agar partisipasi tidak berhenti pada konsultasi.

Evaluasi Ex-post

Perhitungan ulang menghasilkan jumlah skor indeks gabungan ex-post/inklusiivitas sebesar 3.797 dengan rata-rata 75,94, rentang 37-100, dan simpangan baku 10,34. Sebanyak 24 responden berada pada kategori sangat efektif, 23 efektif, dua kurang efektif, dan satu tidak efektif. Nilai ini menunjukkan persepsi yang cenderung positif, tetapi instrumen sumber menggabungkan evaluasi pascapelaksanaan dan inklusiivitas dalam satu kolom. Karena data butir tidak tersedia secara

terpisah, hasil tidak dapat digunakan untuk menentukan secara presisi konstruk mana yang lebih kuat. Temuan kuantitatif karena itu dibaca bersama bukti kualitatif dan diposisikan sebagai indikator persepsi, bukan bukti kausal tunggal.

Pertama, pada penyesuaian organisasi dan pengangkatan perangkat, pemerintah desa melaksanakan penjaringan terbuka agar warga yang memenuhi persyaratan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi. Evaluasi kinerja memperhatikan kehadiran, partisipasi dalam rapat bulanan, dan kemampuan unit kerja menjalankan pelayanan. Keterangan wawancara dan dokumen yang ditelaah memperlihatkan perbaikan prosedur, tetapi naskah sumber belum menyediakan data pembandingan mengenai jumlah pelamar, hasil seleksi, atau perubahan kinerja antarperiode. Karena itu, klaim keberhasilan dibatasi pada perubahan proses yang teridentifikasi.

Kedua, peningkatan pelayanan administrasi ditempuh melalui bimbingan teknis yang difasilitasi kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pelatihan mencakup administrasi pemerintahan, sistem keuangan desa, dan indeks desa membangun. Tata kelola yang baik dan partisipasi masyarakat mendukung peningkatan kinerja pelayanan desa (Handayani et al., 2023). Namun, lembaga mitra, rencana kerja sama, keluaran yang ditargetkan, dan sumber daya pelaksana belum dirinci dalam dokumen penelitian. Temuan yang dapat ditegaskan ialah bahwa kolaborasi antarlembaga belum menjadi mekanisme kerja yang stabil.

Ketiga, penetapan prioritas dan penyusunan dokumen pembangunan diperkuat melalui penyediaan informasi APBDes dan pemanfaatan portal desa. Transparansi perlu dinilai dari informasi yang benar-benar dapat ditemukan, dipahami, dan digunakan warga untuk mengawasi keputusan (Cucciniello et al., 2017). Portal desa

memperluas akses terhadap data penduduk, kegiatan pembangunan, dan layanan mandiri, tetapi transformasi digital menuntut perubahan proses dan kapasitas, bukan sekadar penggunaan teknologi (Mergel et al., 2019). Pembaruan data, penanggung jawab pengelolaan, aksesibilitas, dan respons terhadap permohonan warga perlu ditetapkan secara rutin.

Inklusivitas Aktor

Inklusivitas aktor terlihat melalui musyawarah desa, kelompok kerja, dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Aktor yang disebut dalam data meliputi pemerintah desa, BPD, PKK, kader posyandu, kelompok tani, organisasi keagamaan, dan warga. Pada butir mengenai kontribusi lembaga dan organisasi terhadap efektivitas pemerintahan desa, 26 dari 50 responden menyatakan setuju, 15 sangat setuju, enam kurang setuju, dan tiga tidak setuju. Agregasi tersebut menunjukkan dukungan umum, tetapi belum memperlihatkan perbedaan persepsi antara pemerintah desa, BPD, organisasi masyarakat, dan warga karena identitas kelompok responden tidak tersedia dalam tabel sumber.

Temuan tersebut menunjukkan adanya basis partisipasi, tetapi belum membuktikan bahwa semua kelompok memiliki pengaruh yang setara. Tata kelola desa yang inklusif perlu mengurangi hambatan keterwakilan, informasi, kemampuan berbicara, dan akses terhadap sumber daya (Annahar et al., 2023). Pengalaman lintas desa di Indonesia menunjukkan bahwa pola kekuasaan lokal memengaruhi siapa yang dapat berpartisipasi dan bagaimana keputusan dijalankan (Aspinall et al., 2025). Partisipasi juga menghasilkan kinerja yang lebih baik ketika kepercayaan dan persepsi risiko dikelola secara terbuka (Song et al., 2021).

Musyawarah desa mencerminkan orientasi transparan dan partisipatif, tetapi kualitas deliberasi perlu dinilai dari keterhubungan antara usulan warga,

keputusan, anggaran, dan laporan pelaksanaan. Partisipasi tanpa mekanisme pertanggungjawaban berisiko menjadi prosedural (Haryanto et al., 2025). Pemerintah desa perlu memublikasikan daftar usulan, alasan prioritas, penanggung jawab, jadwal, serta status tindak lanjut. Penguatan ini juga relevan dengan temuan bahwa transparansi berkontribusi terhadap kepercayaan, sementara persepsi korupsi dapat melemahkan hubungan tersebut (Sofyani & Tahar, 2023).

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat telah berjalan melalui dukungan terhadap organisasi formal dan nonformal. Kendala utama ialah keterbatasan dana dan rendahnya dukungan kesejahteraan bagi sebagian pelaku. Kolaborasi antarlembaga dapat membantu menggabungkan pengetahuan, jaringan, dan sumber daya, tetapi membutuhkan tujuan bersama dan pembagian peran yang jelas. Platform kolaborasi yang dirancang secara sadar dapat memperkuat kapasitas pemecahan masalah lintas organisasi (Ansell & Gash, 2018).

Tabel 2. Statistik Deskriptif Hasil Evaluasi

Dimensi	Rerata	Rentang	SD
Ex-ante dan on-going	73,52	41-90	13,19
Ex-post dan inklusivitas*	75,94	37-100	10,34

KESIMPULAN

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Ulaweng Cinnong menunjukkan bahwa pelaksanaan arah kebijakan RPJMDes 2017-2022 dinilai efektif oleh responden, dengan rata-rata 73,52 untuk evaluasi ex-ante/on-going dan 75,94 untuk indeks gabungan ex-post/inklusivitas. Secara substantif, perbaikan paling terlihat pada keterbukaan penjangkauan perangkat, peningkatan kapasitas administrasi, penyediaan informasi anggaran,

pemanfaatan portal desa, dan keberadaan forum musyawarah. Namun, bukti yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan dampak kausal ataupun memisahkan tingkat keberhasilan evaluasi pascapelaksanaan dari inklusivitas aktor.

Perbaikan berikutnya perlu memisahkan indikator evaluasi pascapelaksanaan dan inklusivitas, membagi sampel secara jelas menurut kelompok aktor, serta menghubungkan usulan warga dengan keputusan, anggaran, penanggung jawab, jadwal, dan status tindak lanjut. Kolaborasi antarlembaga perlu diterjemahkan ke dalam pembagian peran dan keluaran yang terukur. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan persepsi 50 responden, tidak tersedianya pembagian responden perkelompok, penggabungan dua konstruk dalam instrumen, tidak lengkapnya statistik validitas dan reliabilitas, serta cakupan studi pada satu desa. Hasil penelitian karena itu lebih tepat digunakan sebagai diagnosis kelembagaan untuk siklus RPJMDes berikutnya daripada sebagai generalisasi bagi seluruh desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurhayadi. (2023). Public policy implementation: A theoretical review. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 10-18. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i1.23742>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: Konsep pelaksanaan. *JRTI Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(1), 83-88. <https://doi.org/10.29210/020211183>
- Bullock, H. L., Lavis, J. N., Wilson, M. G., Mulvale, G., & Miatello, A. (2021). Understanding the implementation of evidence-informed policies and practices from a policy perspective: A critical interpretive synthesis. *Implementation Science*, 16, Article

18. <https://doi.org/10.1186/s13012-021-01082-7>
- Aspinall, E., Berenschot, W., Savirani, A., & Ruhyanto, A. (2025). Analysing and explaining variation in village governance regimes across Indonesia. *South East Asia Research*, 33(1), 12-31. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483168>
- Haryanto, Berenschot, W., & Aspinall, E. (2025). Participation without accountability: Deliberative democracy in village Indonesia. *South East Asia Research*, 33(1), 49-67. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483162>
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397-418. <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070>
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3, Article 100089. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Annahar, N., Widianingsih, I., Paskarina, C., & Muhtar, E. A. (2023). The road to inclusive decentralized village governance in Indonesia. *Sustainability*, 15(11), Article 8616. <https://doi.org/10.3390/su15118616>
- Knap, L. J., Friele, R. D., van Gasteren, R., & Legemaate, J. (2023). Factors influencing the impact of ex-post legislative evaluations: A scoping review. *The Journal of Legislative Studies*, 31(3), 852-875. <https://doi.org/10.1080/13572334.2023.2268320>
- Nabatchi, T., Sancino, A., & Sicilia, M. (2017). Varieties of participation in public services: The who, when, and what of coproduction. *Public Administration Review*, 77(5), 766-776. <https://doi.org/10.1111/puar.12765>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1-13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLOS ONE*, 15(5), e0232076. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Douglas, S., Ansell, C., Parker, C. F., Sørensen, E., Torfing, J., & Wihlborg, E. (2020). Understanding collaboration: Introducing the collaborative governance case databank. *Policy and Society*, 39(4), 495-509. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1794425>
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32-44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation:

- Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), Article 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Song, R., Li, S., & Feldman, M. W. (2021). Public participation and governance performance in gender-imbalanced central rural China: The roles of trust and risk perception. *Social Sciences*, 10(7), Article 243. <https://doi.org/10.3390/socsci10070243>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2023). Transparency and community trust in village government: Does corruption perception matter? *Financial Accountability & Management*, 39(4), 845-865. <https://doi.org/10.1111/faam.12351>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16-32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>